



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI JAMBI**

**RESES MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2016-2017**

**KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA
2016**

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Jambi adalah Provinsi yang memiliki sumber daya alam melimpah sehingga sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan berkembang cukup baik.

Kegiatan perekonomian masyarakat Jambi dominan pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Oleh karenanya kelestarian lingkungan menjadi prasyarat utama agar ekonominya berkembang. Selama kurun waktu 2011-2014 ekonomi Provinsi Jambi Tumbuh rata-rata 7,43 persen.

Sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan merupakan sektor pendorong perekonomian Jambi tumbuh positif dari tahun 2011 -2014. Komoditas unggulan Provinsi Jambi dalam bidang pertanian antara lain karet, kelapa sawit, dan kelapa. Selama kurun waktu 2010-2014 pendapatan per kapita di Provinsi Jambi cenderung meningkat dan berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2014 rasio PDB Jambi terhadap PDB nasional sebesar 105,75% atau 5,75% lebih tinggi dari rata-rata PDB Nasional.

Dibalik pertumbuhan ekonomi Jambi yang cukup tinggi, ada sejumlah permasalahan yang perlu penanganan serius karena akan berpengaruh signifikan bagi perekonomian Provinsi Jambi. Defisit listrik adalah masalah yang dihadapi Provinsi Jambi saat ini. Meskipun saat ini di Jambi terdapat 46 pembangkit listrik yang beroperasi, tetapi hanya mampu menghasilkan energy listrik sekitar 358 MW. Saat ini Jambi kekurangan pasokan listrik hingga 90.MW. Dibutuhkan tambahan pasokan listrik 109 MW agar kebutuhan listrik Jambi pada 2016 terpenuhi. Saat ini rasio elektrifikasi di Jambi baru mencapai 81,05%.

Partisipasi swasta dalam membantu mengatasi kekurangan listrik sangat dibutuhkan. Saat ini swasta yang mengembangkan kelistrikan melalui energy baru dan terbarukan adalah PT Rimba Palma Sejahtera Lestari anak perusahaan Growth Steel Group melalui PLTU biomassa dengan bahan bakar cangkang sawit, listrik yang dihasilkan sebesar 2 x 150 MW.

Selain permasalahan listrik, Jambi juga menghadapi kelangkaan pasokan elpiji 3kg. Kelangkaan gas bersubsidi hanya terjadi di daerah-daerah kabupaten yang jauh

dari pusat distribusi gas Pertamina Jambi, tetapi juga terjadi di Kota Jambi. Kelangkaan gas bersubsidi di Kota Jambi juga terjadi secara menyeluruh hingga ke tingkat rukun tetangga (RT) di 11 kecamatan di kota Jambi.

Pasokan gas bersubsidi tabung 3 kg dari Pertamina di Provinsi Jambi tahun ini rata-rata 1.630.000 tabung/hari. Pasokan gas bersubsidi tersebut tidak berkurang kendati bright gas sudah beredar di Jambi. Salah satu penyebabnya adalah banyak warga masyarakat yang bukan penerima subsidi seperti para pengusaha restoran, warung makan dan keluarga mampu di Jambi menggunakan gas bersubsidi tabung 3 kg. Pertamina telah mengambil langkah solutif untuk meringankan beban ekonomi pengusaha restoran, warung makan dengan memasok sekitar 60.000 tabung bright gas ukuran 5,5 kg. Harga bright gas tersebut cukup terjangkau yaitu Rp 75.000/tabung.

Permasalahan berikutnya yang dihadapi Jambi adalah masalah lingkungan berupa kebakaran hutan dan lahan, penambangan tanpa ijin untuk bahan galian emas, konflik lahan dengan hutan, dan bencana banjir.

24 Oktober 2016 yang lalu akibat penambangan emas tanpa ijin di Desa Sei Macang, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin telah mengakibatkan 11 penambang tewas tertimbun longsoran lubang tambang. Aktivitas penambangan emas liar merusak telah merusak tatanan lingkungan terutama daerah aliran sungai dan menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang. Empat kabupaten di Jambi yaitu Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo dinyatakan memiliki potensi emas yang sangat luar biasa, khususnya di sepanjang aliran sungai. Inilah yang mendorong maraknya pertambangan emas tanpa ijin.

Selain emas Jambi merupakan penghasil batubara yang cukup besar. Berdasarkan penyelidikan, potensi sumber daya batubara di Provinsi Jambi mencapai 1,52 miliar Metrik Ton. Deposit batubara ada di Batanghari, Muaro Jambi, Tanjungjabung Barat, Tebo, Bungo, Merangin dan Sarolangun. Dari total sumber daya batubara yang ada baru 90 juta ton. Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Provinsi Jambi saat ini ada sebanyak 78 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara (Minerba) dan belum produksi karena perusahaan sedang melakukan eksplorasi. Rinciannya, untuk pemegang IUP Batubara di wilayah Kabupaten Batanghari sebanyak 22 IUP,

Muarojambi 7 IUP, Sarolangun 11 IUP, Tanjung Jabung Barat 10 IUP, Tebo 19 IUP, serta Bungo dan Merangin masing-masing 1IUP. Potensi batubara di Jambi banyak dilirik oleh kalangan pengusaha untuk mendirikan pembangkit listrik depan mulut tambang.

Provinsi Jambi adalah salah satu penghasil minyak dan gas bumi yang cukup besar. Di Provinsi Jambi, ada 22 wilayah kerja migas. Sepuluh wilayah sudah produksi, selebihnya baru eksplorasi. Saat ini, daerah penghasil minyak di Provinsi Jambi berada di tujuh kabupaten. Yakni, Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Kerinci. Sedangkan daerah penghasil gas ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi.

Industri hulu migas merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonomi Jambi pada Kuartal II tahun 2016 sebesar 3,57 persen year on year (yoy) masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian 17,5 persen dengan kontribusi sebesar 0,44 persen terhadap pertumbuhan PDRB Jambi triwulan II tahun 2016. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Jambi sebesar Rp 42,2 triliun. Sayangnya kinerja industri migas di Jambi sedang mengalami penurunan.

Hingga Juli 2016 produksi minyak di seluruh KKKS di Jambi hanya 20.854 Barrel Oil Per Day (BOPD). Sedangkan produksi gas hanya 265,19 Million Standard Cubic Feet (MMSCFD). Di Jambi terdapat 96 sumur tua yang saat ini tidak berfungsi lagi. Diantaranya sumur yang berada di Kecamatan Tempino Kabupaten Muarojambi, sumur di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dan sumur di Kelurahan Kenali Asam Kota Jambi.

Saat ini jumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mempunyai wilayah kerja di Provinsi Jambi sebanyak 15 KKKS. Dari jumlah tersebut, 5 KKKS telah berproduksi dan 10 KKKS masih dalam tahap eksplorasi. Selain itu, terdapat 3 Technical Assistance Contract (TAC) yang telah berproduksi.

Di tengah menurunnya produksi minyak dan gas, usaha hulu migas dihadapkan pada persoalan penemuan 45 sumur minyak ilegal (*illegal drilling*) di Kabupaten Sarolangun. Produksi minyak mentah dari 45 sumur itu dalam satu hari mencapai 30 ton atau 30.000 liter. Selain di Sarolangun, illegal drilling juga ditemukan di Kabupaten

Batanghari. Sumur liar tersebut berada di wilayah kerja KKKS Techwin Energy South Betung Ltd. Di lokasi ini penambang minyak liar cukup mengebor di kedalaman 40-60 meter, dan sudah menemukan minyak.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jambi adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Jambi khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah.

4. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Jambi pada kesempatan ini pada sektor penyediaan energi dan masalah kelistrikan. Pertambangan Emas Tanpa Ijin, dan penanganan sumur minyak liar (illegal drilling)

C. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 22 Desember 2016 dengan lokasi tujuan kunjungan ke Provinsi Jambi.

Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Gubernur dan DPRD Prov Jambi beserta jajarannya, Bupati dan Walikota di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Dirjen Migas, Dirjen Minerba, Dirjen EBTKE, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, BLH Kementerian LHK, Kementerian RIstek & Dikti, PT Pertamina (Persero), Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas.
2. Pertemuan dengan Direksi PT Pertamina (Persero), dan jajarannya terkait dengan permasalahan distribusi elpiji 3 kg dan distribusi BBM.
3. Peninjauan PLTU Biomassa Rimba Palma di Daerah Payo Sei Lincih

D. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jambi adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta Riset dan Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan.

Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

E. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan)
2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan.
3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya.
4. Pembahasan dan tindak lanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat Komisi VII DPR RI.

F. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi,

No	Nama	No. Angg	Fraksi	Jabatan
1	Ir. H. Mulyadi	A-403	P.Demokrat	Ketua Tim
2	Syaikul Islam Ali, Lc, M.Sos	A-63	PKB	Wk K Tim
3	Mercy Chriesty Barends, ST	A-228	PDIP	Anggota
4	Yulian Gunhar, SH, MH	A-136	PDIP	Anggota
5	Adian Yunus Yusak Napitupulu	A-156	PDIP	Anggota
6	H. Dito Ganinduto, MBA	A-278	P Golkar	Anggota
7	H. Hardisoesilo	A-284	P. Golkar	Anggota
8	H. Indro Hananto	A-305	P. Golkar	Anggota
9	Ir. Harry Poernomo	A-358	P. Gerindra	Anggota
10	Aryo P.S Djojohadikusumo	A-342	P. Gerindra	Anggota
11	Muhammad Nasir	A-405	P.Demokrat	Anggota
12	H. Mat Nasir S.Sos	A-438	P.Demokrat	Anggota
13	Hadi Zainal Abidin, S.Pd, MM, MHP	A-68	PKB	Anggota

14	DR. H. Zulkifliemansyah, SE, MSc	A-116	PKS	Anggota
15	H. Achmad Fariad	A-517	PPP	Anggota
16	E. Endre Saifoel	A-6	Nasdem	Anggota

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Kunjungan Kerja Ke Kantor Gubernur Provinsi Jambi

Kunjungan Kerja Komisi VII ini disambut oleh Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan dihadiri oleh jajaran satuan kerja pemerintah daerah Provinsi Jambi serta para utusan perwakilan dari kabupaten dan kota di lingkungan Provinsi Jambi. Dari Pemerintah Pusat hadir Dirjen Migas, Dirjen Minerba, dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; Kementerian LHK, Direktur Pemasaran Pertamina (Persero), Direktur PLN Region Jambi. Diskusi ini membahas permasalahan kelistrikan, penambangan emas tanpa ijin (PETI), penambangan batubara dan permasalahannya, masalah illegal drilling, pasokan gas, kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan kegiatan penambangan.

2.2. Kelistrikan di di Provinsi Jambi

Urusan kelistrikan di Wilayah kerja PT PLN (Persero) di Provinsi Jambi meliputi tiga area yaitu:

- a) Area Jambi dengan luas wilayah pelayanan 53.436 Km² dengan penduduk 1,6 juta meliputi 6 rayon yaitu Rayon Telanai Pura, Rayon Kota Baru, Rayon Seberang-Kota, Rayon Muara Bulian, Rayon Muara Sabak, dan Rayon Kuala Tungkal.
- b) Area Muara Bungo dengan luas wilayah pelayanan 53.426 Km² melayani 5 kota/kabupaten dengan penduduk 1,18 juta jiwa. Yaitu rayon Bungo Kota, Rayon Bangko, Rayon Sarolangun, Rayon Rimbo Bujang, dan Rayon Muara Tebo.
- c) Area Padang (Masuk Wilayah Sumatera Barat) dengan luas wilayah 3.746 Km² dengan penduduk 311.000 jiwa dengan dua Rayon, yaitu Rayon Sungai Penuh dan Rayon Kersik Tuo.

Kendala kelistrikan di Jambi

Kelistrikan di Jambi menghadapi masalah khronis yaitu pemadaman, berdasarkan laporan Direktur Regional Bisnis Sumatera Utara ada enam kendala

yang mengakibatkan sering terjadi pemadaman listrik di Jambi. Kendala tersebut adalah:

- Keterbatasan pasokan daya listrik. Sebelum bulan Oktober daya listrik di Jambi hanya 196 MW dengan beban puncak 296 MW atau terjadi kekurangan sekitar 90 MW. Saat ini yang menjadi persoalan adalah daya listrik tidak dapat terdistribusikan dengan baik. Jumlah listrik yang dihasilkan oleh 11 pembangkit sebesar 656 MW dengan rincian sebagai berikut

Pembangkit Subsistem Jambi

No	Pembangkit	DMN (MW)
1	PLTG Batang Hari 1	30
2	PLTG Batang Hari 2	30
3	PLTG BOT Payoselincah 1	47
4	PLTG BOT Payoselincah 2	47
5	PLTG Jambi Sewa 1	30
6	PLTG Jambi Sewa 2 (operasi Okt 2016)	50
7	PLTU Bio Massa (operasi Nov 2016)	20
	Sub Total	254
8	PLTMG Sei Gelam	12
9	PLTMG CNG Sei Gelam (operasi Okt 2016)	90
10	PLTU Sumsel V 1 (operasi Nov 2016)	150
11	PLTU Sumsel V 2 (operasi Nov 2016)	150
	Sub Total	402
	Total	656

Daya listrik di Provinsi Jambi saat ini cukup untuk melayani beban puncak 296 megawatt (MW). Namun daya listrik tersebut sulit dipasok ke daerah terpencil karena keterbatasan jaringan tiang dan kabel listrik. Beban gardu induk untuk waktu beban puncak hanya 289 MW dan ketika beban rendah 192 MW. Rinciannya sebagai berikut:

Beban Gardu Induk Subsistem Jambi

No	GARDU INDUK	LWBP (MW)	WBP (MW)
1	PayoseIncah	60	90
2	Muarasabak	10	18
3	Aurduri	35	50
4	Sei Gelam	18	26
	Sub Total	123	184
5	Muara Bulian	15	25
6	Muarabungo	34	50
7	Bangko	20	30
	Sub Total	69	105
	Total	192	289

Ada gap pembangunan pembangkit dengan gardu induk dan saluran transmisi. Untuk contoh Gardu Induk Muara Sabak yang dibangun pada bulan Februari 2012 dan selesai tahun 2013. Namun jaringan Transmisi baru dibangun pada Oktober 2012, selesai pada Agustus 2016 dan siap dialiri listrik.

Untuk meningkatkan pasokan listrik, PLN Direktorat Regional Sumatera membuat RUPTL 2015 – 2024 sebagai berikut:

Pembangkit Jambi (RUPTL 2015 – 2024)

No	Nama Pembangkit	Bh Bakar	COD	Daya Mampu Netto (MW)
1	PLTMG Sewa	Gas	2016	50
2	Mobile PP Sumbagselteng/ T.Jabung PLTG/MG	Gas	2016	75
3	Batanghari Ekspansi (ST)	Gas	2017	35
4	Jambi Peaker PLTGU/MG	Gas	2018	100
5	Jambi PLTU	Btbara	2019	1.200
6	Sungai Penuh (FTP2)	P. Bumi	2022	110

7	PLTA Merangin	Air	2025	350
	Total			1.915

Di Provinsi Jambi terdapat dua proyek PLN yang tidak jalan di tahun 2016 yaitu pembangunan PLTU mjlut tambang yang berada di Kabupaten Tebo dengan kapasitas 2 x 100 MW dan program isolatif dengan kapasitas 2 x 100 MW di Kabupaten Merangin, Kerinci Sarolangun dan Kota Jambi.

- Evakuasi daya pembangkitan Jambi hanya mengandalkan 1 jalur backbone (PHT Muara Bungo, - Muara BUlan – Aduri). Sekarang sudah ditindaklanjuti dengan pemangunan SUTT GI Betung – GI Bayung Uncir – GI Aur Daun. Tingkat kemajuan yang dicapai adalah sudah pada tahap konstruksi dan pembebasan lahan.
 - Adanya permasalahan sosial yang menghambat pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan yakni:
 - Penolakan masyarakat terhadap SUTT/SUTET, terutama masyarakat yang dilalui jalur SUTT/SUTET Penolakan masyarakat terkait nilai kompensasi pembebasan lahan dan ROW. Ini terjadi di SUTT 150 KV Bangko – Meranginl – Sungai Penuh dimana kegiatan dimulai sejak tahun 2007. Pihak PLN mengalami kesulitan dalam menerapkan Permen ESDM No 38 Tahun 2013. Ini adalah kendala terberat. Jalan keluarnya Pemerintah Provinsi Jambi dan PLN membentuk tim percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan Provinsi Jambi untuk memediasi tuntutan masyarakat terkait pembangunan tapak tower.
 - Penolakan masyarakat terkait nilai ganti rugi untuk tapak tower. Ini terjadi dalam pembangunan SUTET 550 KV New Aur Duri – Pranap (Riau) di wilayah Prov Jambi ada 301 Tower, kegiatan pembangunan dimulai tahun 2016. Masyarakat meminta harga diatas KIPP.
 - Pencurian material tower yang sudah berdiri
- Pihak PLN dalam mengatasi persoalan tersebut melakukan langkah-langkah diantaranya:

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya SUUT/SUTET untuk tersalurjya energy listrik
- Kerjasama dengan penegak hukum, antara lain dengan Kejaksaan dan Kepolisian dalam rangka proses percepatan program 35.000 MW.
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat agar proses penyelesaian terkait lahan dan ROW dapat diselesaikan .

Pelanggan listrik di Jambi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2012 jumlah pelanggan listrik baru 493.902 pada November 2016 sudah meningkat menjadi 675.009. Dalam waktu 4 tahun telah meningkat sebesar 36,67%, atau rata-rata pertumbuhan pelanggan listrik mencapai 7,33%. Daftar tunggu pelanggan sampai dengan 15 Desember 2016 mencapai 3.662.

Peningkatan elektrifikasi di Jambi cukup signifikan pada tahun 2012 tingkat elektrifikasi baru 64,91% sampai dengan November tahun 2016 sudah 81,89% sementara target PLN adalah 82%. Desa berlistrik di Jambi sudah mencapai 27.357 desa dari total 28.559 desa sementara desa yang belum berlistrik 1.202 desa.

Di Provinsi Jambi saat ini terdapat swasta yang memiliki pembangkit sendiri untuk memenuhi kebutuhan industri sawit dan kelebihan listriknya dijual ke PLN. Perusahaan tersebut adalah PT Rimba Palma Sejahtera Lestari. Pembangkit yang dimilikinya mengosumsi 300 MT cangkang sawit sehari. Kapasitas pembangkit yang dimilikinya sebesar 2 x 15 MW. Untuk pemakaian sendiri 2 x 5 MW sisanya dijual ke PLN 2 x 10 MW.

PLTBm Unit 1 PT Rimba Palma Sejahtera Lestari beroperasi sejak tahun 2013 awalnya untuk memenuhi kebutuhan listrik internal perusahaan. Pada bulan Januari 2015 mulai COD *excess power* 10 MW disalurkan ke PLN Wilayah S2JB. PLTBm No 2 selesai dibangun dan diuji operasi tahun 2014. Pada bulan Nopember 2016 COD *excess power* 10 MW disalurkan ke PLN Wilayah S2JB.

Permasalahan yang dihadapi oleh PLTBm PT Rimba Palma dengan *excess power* 2 x 10 MW adalah PLN belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan energy dari pembangkit listrik EBT berbasis biomassa. PLN mengoperasikan pemangkit berdasarkan *merit order* dimana pembangkit yang

termurah menjadi prioritas utama. Ini memberikan disinsentif bagi penyedia energy listrik berbasis EBT. PLN dalam memanfaatkan EBT PLTBm PT Rimba Palma hanya pada saat sistem membutuhkan. Selain itu harga beli energy listrik PLTBm Rimba Palma adalah Rp 900 / kwh di bawah haraga Permen ESDM.

Untuk itu diperlukan kebijakan penyangga yang memberikan insentif bagi energy listrik yang berasal dari EBT. Diantaranya adalah:

- PLN menambahkan golongan tariff baru pada TTL yang berkaitan dengan *green energy* misalnya dengan menetapkan Tarif G Rp 3000/kwh.
- Masyarakat, Toko, Perkantoran, Perhotelan yang berminat dengan *green energy* dibolehkan mengajukan permintaan ke PLN untuk pindah golongan tariff daya dengan tujuan untuk mendapatkan label "*green energy*"
- Selisih harga terhadap tariff lama adalah merupakan "dana penyangga EBT"
- Golongan tariff G diluncurkan untuk uji coba pasar.

2.2. Masalah Distribusi Gas dan jaringan Gas Kota di Provinsi Jambi

Harga gas LPG ukuran tabung 3 kg di Kota Jambi semakin melambung karena belum teratasinya kelangkaan gas. Pada 17 Nopember 2016 harga gas LPG 3 kg mencapai Rp 25.000 per tabung naik Rp 8.000 dari harga normal Rp 17.000. Selain jarga naik, LG 3 kg juga langka di pangkalan dan pengecer gas. Pasokan gas LPG tabung 3 kg di Kota Jambi setiap bulan mencapai 417.200 tabung. Dalam merespon maslaah kelangkaan gas LPG 3 kg Pertamina telah menambah pasokan gas LPG 3 kg sekitar 457.520 atau ditambah 9,6% dari kebutuhan sebelumnya.

Kelangkaan gas LPG 3 kg dikarenakan sistem distribusi terbuka sehingga pihak-pihak yang tidak berhak menggunakan gas LPG 3 kg yang disubsidi masih bisa menggunakan gas tersebut.

Pada tahun 2012 PT Pertamina divisi Gas ditunjuk untuk menjadi operator jaringan gas kota. Direncanakan 4.000 rumah di kelurahan Handil Jaya dan Thehok Kota mendapatkan aliran gas pada akhir Agustus 2015. PT Pertamina Divisi Niaga

Gas selaku operator yang ditunjuk Pemerintah Pusat dan PT JII (Jambi Indoguna International) selaku operator daerah sebagai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Jaringan gas ini dibiayai melalui APBN.

Dari sambungan gas kota yang direncanakan sebanyak 4.000 sambungan pada tahun 2016 yang terealisasi baru 3392. Penyebabnya pipa lama mengalami kerusakan (buntu) sehingga 638 rumah tangga belum bisa disambungkan. Pipa sudah dimasukkan tapi gasnya tidak bisa disalurkan. Kendala penyaluran gas kota adalah adanya perubahan jalur dan sejumlah pemilik rumah yang sulit untuk ditemui.

Harga gas kota untuk rumah tangga di Kota Jambi terbagi empat golongan. Rumah Tangga I harga Rp 45.500 per M3 (khusus untuk masyarakat menengah ke bawah). Rumah Tangga II yaitu rumah dengan daya listrik 1.300 Watt harga Rp 7.000. Harga untuk PK I (Pedagang kecil, rumah ibadah, sekolah negeri, instansi pemerintah, dan RSUD) sebesar Rp 4.500. Harga untuk PK 2 (hotel, rumah makan besar, rumah sakit swasta besar) Rp 7.000.

2.3. Perkembangan Industri Migas di Provinsi Jambi

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia penghasil Minyak dan Gas (migas) bumi, namun kemajuan wilayahnya masih tak sebanding dengan banyaknya jumlah produksi migas yang disedot dari tanah Jambi. Saat ini tercatat ada tujuh daerah penghasil migas di Jambi. Yakni Kabupaten Muarojambi, Batanghari, Tebo, Sarolangun, Tanjungjabung Barat, Tanjungjabung Timur dan Kota Jambi. Realisasi kumulatif produksi minyak bumi sebanyak 3.667 barel dan produksi gas alam dengan realisasi kumulatif sebanyak 40.553 MMBTU.

Berdasarkan monitor alokasi *lifting* minyak mentah per daerah penghasil yang dikeluarkan Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, produksi migas Jambi 2011 mencapai 28.63 million barrel per day (MBPD), namun di 2016 turun menjadi 23.37 MBPD. Saat ini cadangan minyak di Jambi terus menipis. Diperkirakan hanya bisa bertahan hingga 30 tahun ke depan.

Perkiraan cadangan wilayah Jambi untuk minyak dan kondensat yakni harapan 82.56 MMSTB, mungkin 66.06 dan terbukti sebesar 79.68 MMSTB. Untuk

gas, harapan 3,056.97 kaki kubik, mungkin 1,323.44 dan yang terbukti 1,966.75 kaki kubik. Saat ini di Jambi terdapat 18 wilayah kerja KKKS. Rinciannya sebagai berikut:

Wilayah Kerja KKKS di Jambi

No	Operator & Periode Efektif	Lokasi Wilayah Kerja
1	Hexindo Gemiliang Jaya, PT. 18 Jan 2007 – 17 Jan 2037	Lemang, lapangan Akatra. Estimasi kumulatif produksi minyak + kondensat 9,90 MMBBL, gas 13,40 BCF
2	Pertamina – Talisman (Jambi Merangin) Ltd. 10-Feb-1989 – 9 Feb 2019	Merangin. Lapangan Pulau Gading & Sungai Kenawang
3	Tately, NV. 30 Des 2003 – 29 Des 2033	Palmerah, wilayah kerja Budi Estimasi kumulatif produksi minyak + kondensat 4,80 MMBBL
4	Seleraya Merangin Dua. 14 Okt 2003 – 13 Okt 2033	Merangin Dua, Lapangan Tampir, Sumur North West Belani 1, Sumur Lumban 1, Sumur Tampi
5	Petrochina International Bangko Ltd. 17 Feb 1995 – 16 Feb 2025	Bangko. Lapangan Piano & Piano West
6	Conocophilips South Jambi. 26 Jan 1990 – 26 Jan 220	South Jambi B. Lapangan T. Rendah, Geger Kalong, Bungin. Sumur Hari—1
7	MontD'Or Oil Tungkal Ltd. 26 Agus 1992 – 25 Agus 2022	Tungkal. Lapangan Mengoepeh, Sumur Pematang Lantih - 3
8	Petrocia Int Jabung. 27 Feb 1993 – 26 Feb 2023	Jabung. Lapangan: Betara Complex, North Geragai, Makmur, Ripah Phase 2, Ripah

Commented [Work1]:

Commented [U2R1]:

Commented [U3R1]:

Commented [U4R1]:

		Phase 2, South West Betara & West Betara area 1, Sumur Mamo-1, Sumur Betara Phase 2, Betra Complex, South Betara & West Betara, Sumur Panen Utara 1.
9	Pertamina EP. 17 Sept 2005 – 16 Sept 2035	Aset 1: Rantau, Pangkalan Susu, Lirik, Jambi, Ramba

Produksi minyak dan kondensat wilayah Jambi per Oktober 2016 20.169 BOPD. Sedangkan produksi gas 363,029 MMSCFD. Dalam menjaga dan menaikkan produksi tetap dilaksanakan kegiatan eksplorasi dengan melakukan survai seismic 2D dan 3D seperti yang dilakukan di Tiung Bejo seluas 320 KM2 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh PetroChina Jabung. Pemboran eksplorasi dan pengembangan sumur Poin Setia 1 di Kab. Batanghari, Puspa 2 & Puspa 3 di Kab. Muaro Jambi, Akeh 2 & Kusuma 2 Kab. Tanjung Jabung Barat, Pauman 1 & 2 . Lapangan *existing* tetap dikembangkan seperti yang dilakukan oleh Pertamina EP Field Jambi dengan melakukan reaktifasi sumur, EOR dan dan Development dan PetroCina Jabung LTD yang menghasilkan minyak dari beberapa sumur baru. Selain itu juga dilakukan pengembangan lapangan baru dan Plan of Development ((POD) untuk lapangan Pematang Lantih dan Ia di Kab. Tanjung Jabung Barat dan Lapangan Akatara.

Dalam menjaga dan meningkatkan produksi KKKS Jambi menghadapi gangguan operasi. Untuk Pertamina EP Asset 1 field Jambi sering mengalami pencurian fasilitas migas seperti kabel, pipa, trafo dll. Klaim pemilikan lahan atau lokasi susmur dan jalan operasi. Juga pencurian minyak bumi pada jalur pipa Tempino – Plaju mulai marak kembali dan sampai dengan bulan Desember sudah terjadi 7 kali *illegal tapping*.

JOBP – Talisman Jambi Merang pada tahun 2015 juga mengalami *illegal tapping* sebanyak 21 kali pada jalur pipa kondensat Sngai Kenawang – Geragai. Gangguan keamana yang lain adalah sabotase dan pencuria alat/fasilitas operasi. Demikian juga Petrocina Jabung Ltd menghadapi *illegal tapping* yang serius. Selain

itu juga illegal drilling yang terjadi di desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.

Langkah yang dilakukan SKK Migas dalam ikut serta menanggulangi permasalahan *illegal drilling* adalah melakukan survai bersama dan sosialisasi pada tanggal 8 Maret 2016, ditemukan 7 titik sumur minyak illegal di wilayah kerja migas Pertamina EP dengan kedalaman rata-rata sumur kurang dari 100 meter dan saat ini masih diproduksi oleh masyarakat. Informasi terakhir sumur illegal telah bertambah menjadi 12 sumur. Bupati Batanghari juga telah menyampaikan permohonan bantuan penutupan sumur minyak illegal. Tanggal 12 Oktober 2016 dilah dilakukan rapat koordinasi SKK Migas – Pertamina EP 1, Dinas ESDM Prov Jambi, Pemkab Batanghari, dan Polda Jambi dalam rangka penutupan sumur minyak illegal. Permohonan bantuan penutupan sumur sudah disampaikan ke SKK Migas Pusat dan Ditjen Migas Kementerian ESDM. Penanggulangan illegal drilling juga dilakukan di desa Lubuk Napal kecamatan Pauh, kabupaten Sarolangun untuk 45 sumur minyak illegal

2.4. Masalah Pertambangan Batubara

Sejumlah wilayah kerja tambang batubara berada di hutan lindung dan kawasan konservasi. Dari luas izin tambang di Jambi mencapai 1.078 juta hektar lebih, sebanyak 480.502,47 hektar di kawasan hutan. Sebanyak 6.300,22 hektar hutan konservasi, 63.662,22 hektar di hutan lindung, serta 410.540,03 hektar hutan produksi. Total 138 izin tambang di kawasan hutan.

Sembilan perusahaan yang melakukan kegiatannya di hutan konservasi adalah PT Abdi Pertiwi Loka, PT Aneka Tambang, PT Arta Bevimdo Mandiri, PT Batu Alam Jaya Mandiri, PT Geomineral Bara Perkasa, PT Jambi Gold, PT Tunas Prima Coal, PT Sarwa Sembada Karya Bumi serta satu izin PKP2B yakni PT Wilson Citra Mandiri. Tiga perusahaan yang sama PT Aneka Tambang, PT Tunas Prima Coal, Jambi Gold bersama dua perusahaan lain: PT Delapan Inti Power dan PT Semen Baturaja (persero) memegang izin tambang di hutan lindung. Ini yang mengakibatkan terjadinya masalah lingkungan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi menyebutkan, izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi (penjajakan) batubara di Jambi sebagian besar akan berakhir pada 2017. Dari total 196 IUP di Jambi, 118 IUP merupakan operasi produksi, sementara 78 IUP eksplorasi yang dimulai dari tahun 2009 dan sudah harus meningkat menjadi operasi produksi. Ada sejumlah persyaratan yang menjadi kendala perusahaan untuk eksploitasi. Pemerintah memberi keringanan untuk melengkapi sejumlah persyaratan tersebut.

Di Jambi saat ini terdapat 71 perusahaan yang melakukan eksplorasi batubara yang dinyatakan *clear and clean*. Tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari sebanyak 22 IUP, Muarojambi 7 IUP, Sarolangun 11 IUP, Tanjung Jabung Barat 10 IUP, Tebo 19 IUP, serta Bungo dan Merangin masing-masing satu IUP.

Dari sebanyak 71 perusahaan batubara yang telah dinyatakan '*clean and clear*' di Provinsi Jambi, hanya 11 perusahaan yang beraktivitas. Mereka adalah perusahaan yang memiliki pasar yang jelas yaitu memasok PLTU maupun PLTG. Sedikitnya perusahaan yang beroperasi mengakibatkan royalti yang diterima pemerintah Provinsi Jambi menurun, dari sebelumnya Rp 86 miliar per tahun sekarang tinggal Rp 20 – 30 miliar pertahun. Tahun 2016 ditargetkan produksi batubara di Jambi 11,2 juta ton tersebut, diharapkan mampu memenuhi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp140 miliar di tahun 2016

10 Perusahaan Tambang Batubara Terbesar di Jambi

No	Perusahaan	Lokasi	No & Th SK	Luas Wilayah (HA)	Tahapan Kegiatan	Tanggal SK
1	Duta Energy Mineratama, PT	Sarolangun	72 th 2009	5.700	Eksplorasi	8 – 1 - 2009
2	Bumi Permata Hijau, PT	Jabung Barat	23 th 2011	4.053	Operasi Produksi	26 – 1 - 2011
3	Terminalindo Idaman Permai, PT	Tanjung Jabung Barat	24 th 2011	4.070	Operasi Produksi	26 – 1 - 2011

3	Terminalindo Idaman Permai, PT	Tanjung Jabung Barat	22 th 2011	3.961	Operasi Produksi	26 – 2 – 2011
4	Aneka Tambang, Tbk,PT	Tebo	137 th 2010	4.975	Eksplorasi	10 – 3 - 2010
5	Asia Multi Investama,PT	Tebo	08 th 2010	4.802	Eksplorasi	25 – 1 – 2010
6	Batanghari Energi Prima	Tebo	135 th 2010	4.380	Eksplorasi	10 – 3 - 2010
7	Berlian Mahkota Coal	Tebo	03 th 2010	5.000	Eksplorasi	15 – 1- 2010
8	Globalindo Alam Lestari	Tebo	309 th 2009	5.000	Eksplorasi	12 – 8 - 2009
9	Globalindo Alam Lestari	Tebo	10 th 2010	4.296	Eksplorasi	25– 1 - 2010
10	Wahana Alam Lestari	Tebo	208 th 2010	4.807	Eksplorasi	21 – 4 - 2010

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan usaha tambang batubara adalah praktek *transshipment*. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dibangun pelabuhan batubara. Di Jambi lokasi pelabuhan batubara di sekitar Teluk Jambi. Setiap tahun diperkirakan sekitar 50 juta-60 juta ton batu bara diekspor secara ilegal sebab belum adanya aturan pemakaian pelabuhan ekspor batu bara. Selain itu perlu menutup tambang batubara yang tidak clean and clear karena di Jambi terjadi pengoplosan batubara yang berasal dari tambang batubara yang menghasilkan kalori tinggi tapi sudah ditutup.

Untuk mengatasi persoalan tersebut perlu diadakan rapat gabungan antara Komisi VII dengan Kapolri untuk membahas permasalahan tambang batubara terutama batubara ilegal. Gubernur Jambi diminta untuk membuat surat ke Komisi VII DPR RI terkait penyelesaian persoalan batubara ilegal yang merugikan negara.

2.4. Masalah Pertambangan Emas Liar (PETI)

Upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk menghentikan aktivitas penambangan emas ilegal di empat kabupaten di Jambi ternyata bukan pekerjaan mudah, karena diduga banyak oknum aparat penegak hukum yang ikut bermain. Dampak penambangan emas liar ini telah merusak lingkungan terutama di daerah aliran sungai. Ada sekitar 156 unit alat berat jenis eskavator di Merangin yang masih mengeruk tanah yang mengandung emas sungai-sungai yang terdapat emas. Dimana pemodal juga mendapat dukungan masyarakat yang diperkerjakan.

Para pemodal membeli tanah masyarakat yang berada di pinggir-pinggir sungai dengan harga sekitar Rp 25 – 30 juta per hektar. Dalam perjanjian jual beli, pemilik modal akan mengembalikan lagi tanah yang dibeli kepada pemilik semula setelah tanah itu ditambang. Upaya pemberantasan tambang emas ilegal terkendala dana, di mana Pemkab Merangin melalui tim terpadu hanya menganggarkan Rp250 juta untuk operasi dan Rp80 juta untuk sosialisasi. Cara tersebut adalah tidak efektif.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menolak penambangan emas liar. Saat ini baru dua desa di kabupaten Sarolangun yang masyarakatnya menolak penambangan emas yaitu desa Lubuk Gedorong dan Muara Cuban, Kecamatan Batang Asai. Salah satu cara mengatasi penambangan emas ilegal adalah dengan memutus penyaluran BBM untuk alat berat. Sebab saat ini aktivitas tambang ilegal sudah merambah ke Hutan Lindung Dusun Manggis. Saat ini ada sekitar 130 unit eskavator yang saat ini sedang beroperasi di Hutan Lindung mengeruk sungai untuk mencari emas.

Penambangan emas liar ini selain merusak lingkungan yaitu tercemarnya lebih dari 30 sungai dan anak sungai di Kabupaten Merangin, Sarolangun, Tebo, dan Batanghari oleh limbah tambang emas berupa lumpur, besi, arsenik, hingga merkuri. Tragedi Minamata bisa terulang di Batanghari atau anak-anak sungainya karena wabah demam emas tak terkendali. Di Kabupaten Sarolangun dan Merangin saja, menurut catatan kelompok Gerakan Cinta Desa (G-Cinde), penambangan emas berlangsung di 30 desa. Di Limun, kecamatan di Sarolangun, ada sekitar 400 penambangan liar aktif. Di Kabupaten Merangin penambangan emas tanpa izin (PETI) meluas ke sawah, kebun, permukiman, bahkan halaman kantor Kecamatan Pangkalan Jambu dan Kepolisian Sektor Tabir Ulu dijadikan sasaran penambangan.

Pencemaran sungai akibat penambangan emas liar ini sangat mengkhawatirkan. Kadar merkuri di permukaan Mesumai mencapai 0,0008 mg/l, arsenik 0,002 mg/l, dan besi 2,73 mg/l. Konsentrasi merkuri dan arsenik itu nyaris mendekati batas aman. Kadar besi sudah sembilan kali lipat ambang itu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 soal bahan baku air minum, batas aman merkuri 0,001 mg/l, arsenik 0,005 mg/l, dan besi 0,3 mg/l. Kadar merkuri air permukaan Sungai Tembesi yang menjadi sumber air PDAM Tirta Sako Batuah, Kota Sarolangun, tepat di garis kritis. Di saluran intake PDAM, kadar logam berat itu mencapai 0,001 mg/l, besi 1,39 mg/l, dan arsenik 0,001 mg/l. Kadar merkuri dalam sampel saluran intake PDAM Merangin, yang airnya bersumber dari Sungai Merangin, sama seperti Sungai Mesumai (0,0008 mg/l), arsenik 0,002 mg/l, tetapi kadar besinya empat kali di atas batas aman (1,31 mg/l). Ketiga sungai itu bermuara di Batanghari. Akibatnya, kualitas air Sungai Batanghari terus memburuk. Penelitian kualitas air oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Jambi, April lalu, di 16 titik menemukan, kategori Batanghari kini tercemar berat (Kelas D), diduga akibat air buangan PETI.

Selain menimbulkan pencemaran penambangan emas liar juga merusak infrastruktur seperti jalan. Bahkan di Muara Bungo penambangan emas liar itu sudah hampir mendekati pintu masuk bandara Muara Bungo. Mereka menambang emas dengan kedok menambang pasir.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

- PLN Region Jambi belum mampu mensinergikan produksi dan distribusi listrik. Produksi listrik di Provinsi Jambi sebenarnya sudah mencukupi, permasalahan terletak pada kapasitas jaringan distribusi yang masih terbatas untuk mentransmisikan daya listrik sehingga pemadaman listrik selalu terjadi.
- Swasta telah berpartisipasi dalam mengembangkan listrik biomassa dengan kemampuan menghasilkan kelebihan daya 2 x 10 MW memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemenuhan daya listrik di Jambi dan juga pengembangan energy baru dan terbarukan.
- Kelangkaan gas LPG 3 kg akibat dari sistem distribusi terbuka yang memberikan akses bagi pihak-pihak yang tidak berhak menggunakan gas LPG 3 kg bersubsidi.
- Program gas kota yang direncanakan sebanyak 4.000 sambungan pada tahun 2016 baru terealisasi 3392. Penyebabnya pipa lama mengalami kerusakan (buntu) sehingga 638 rumah tangga belum bisa disambungkan. Pipa sudah dimasukkan tapi gasnya tidak bisa disalurkan.
- KKKS Jambi menghadapi gangguan operasi berupa *illegal drilling* dan *illegal tapping* yang cukup signifikan.
- Dalam kegiatan perusahaan batubara terjadi praktek-praktek yang melanggar hukum seperti transshipment akibat tidak adanya pelabuhan khusus batubara dan pengoplosan batubara berkalori tinggi yang berasal dari tambang yang sudah ditutup dengan batubara kalori rendah.
- Penambangan emas tanpa ijin telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap pencemaran lingkungan, yaitu tercemarnya anak sungai

dan sungai Batanghari oleh limbah kegiatan usaha pertambangan berupa limbah B3 yang berbahaya bagi makhluk hidup.

3.1.2. Rekomendasi

- Ditjen Kelistrikan harus mengawasi tata kelola kelistrikan di Jambi agar PLN Region Jambi meningkatkan kinerjanya dengan mengurangi frekuensi pemadaman listrik dan melakukan percepatan pembangunan gardu induk dan saluran transmisi listrik agar daya listrik bisa disalurkan secara merata dan optimum sehingga mampu memenuhi kebutuhan kelistrikan di Jambi baik pada keadaan biasa maupun pada beban puncak.
- Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan distribusi LPG 3 kilogram dan membantu Pemerintah dan PT Pertamina untuk melaksanakan distribusi gas LPG 3 kg dengan sistem tertutup.
- Diperlukan kerjasama lintas instansi antara KKKS, Kepolisian Negara RI, TNI, Kepolisian Daerah Jambi, dan Kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum terhadap praktek *illegal drilling* dan *illegal tapping*.
- Komisi VII DPR RI perlu melakukan rapat gabungan dengan Kapolri untuk mencari jalan keluar penyelesaian batubara illegal di Provinsi Jambi dan meminta Gubernur Provinsi Jambi mengajukan surat ke Komisi VII terkait penyelesaian persoalan batubara illegal.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Lampung sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jakarta, 19 Desember 2016

**Pimpinan Delegasi
Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI**

Ir. Mulyadi